KORIDOR SUKU BUNGA (*STANDING FACILITIES*)

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor 17/39/DPM, tanggal 16 November 2015)

Kepada
SEMUA BANK UMUM

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5141) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/20/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5764) dan dalam rangka upaya penguatan infrastruktur transaksi Operasi Moneter, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai koridor suku bunga (*Standing Facilities*) dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan koridor suku bunga (*standing facilities*).
3. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Moneter.
4. Koridor Suku Bunga (*Standing Facilities*) yang selanjutnya disebut *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana Rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana Rupiah (*deposit facility*) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
5. BI-Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
6. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Surat Berharga Negara yang digunakan dalam transaksi *Standing Facilities* yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk transaksi *lending facility* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter.
7. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Surat Berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
8. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Surat Berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank.
9. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
10. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah Surat Berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
11. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing sebagai

bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

12. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
13. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
14. Zero Coupon Bond yang selanjutnya disingkat ZCB adalah Obligasi Negara tanpa kupon, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
15. Obligasi Negara Ritel yang selanjutnya disebut ORI adalah Obligasi Negara yang pada pasar perdana dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.
16. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan Surat Berharga dan setelmen dana seketika.
17. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan Surat Berharga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan Surat Berharga dan setelmen dana seketika.
18. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan

transaksi, penatausahaan Surat Berharga dan setelmen dana seketika.

19. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia.
20. Rekening Surat Berharga adalah rekening Bank pada BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi Surat Berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
21. Setelmen Surat Berharga (*securities settlement*) adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga dalam rangka penatausahaan.
22. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka penatausahaan.
23. Delivery Versus Payment yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.

II. KARAKTERISTIK STANDING FACILITIES

1. Standing Facilities merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka injeksi dan absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang.
2. Standing Facilities terdiri atas:
 - a. penyediaan dana Rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank (*lending facility*); dan
 - b. penempatan dana Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia (*deposit facility*).
3. Standing Facilities disediakan oleh Bank Indonesia pada setiap hari kerja Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank Indonesia.
4. Pengajuan transaksi Standing Facilities dilakukan melalui Sistem BI-ETP.
5. Jangka waktu Standing Facilities adalah 1 (satu) hari kerja (*overnight*).
6. Jumlah hari dalam perhitungan *repurchase agreement (repo) rate* atau tingkat diskonto Standing Facilities dihitung berdasarkan hari kalender.
7. Window time Standing Facilities diatur seb-

agai berikut:

- a. Penyediaan dana Rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank (lending facility) dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. Penempatan dana Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia (deposit facility) dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Bank Indonesia mengumumkan transaksi Standing Facilities melalui Sistem BI-ETP, dan/atau sarana lainnya sebelum window time Standing Facilities.
 9. Dalam hal terdapat perubahan window time, seri dan jenis Surat Berharga, haircut, repo rate, dan/atau tingkat diskonto, pengumuman dilakukan sebelum window time Standing Facilities.
 10. Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan Standing Facilities yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 11. Bank dilarang membatalkan pengajuan Standing Facilities yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
 12. Bank wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah dan/atau Surat Berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen Standing Facilities.
 13. Dalam hal setelah terjadinya transaksi, tanggal jatuh waktu Standing Facilities ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan bunga repo atau diskonto atas tambahan jangka waktu transaksi Standing Facilities.
 14. Pada saat Standing Facilities jatuh waktu, setelmen dilakukan pada tanggal jatuh waktu sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS.
 15. Bank Indonesia menatausahakan Standing Facilities pada Rekening Surat Berharga di BI-SSSS.

III. LENDING FACILITY

1. Prinsip Transaksi

- a. Transaksi lending facility dilakukan dengan mekanisme repo Surat Berharga, yaitu penjualan Surat Berharga oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh Bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- b. Transaksi lending facility dengan mekanisme repo Surat Berharga dilakukan dengan prinsip sell and buy back, yaitu terdapat perpindahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga (transfer of ownership).
- c. Transaksi lending facility dilakukan dengan mekanisme nonlelang.

2. Surat Berharga

- a. Surat Berharga yang dapat di-repo-kan adalah SBI, SDBI dan SBN dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter.
- b. Surat Berharga yang dapat di-repo-kan paling banyak sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dimiliki Bank, yang tercatat di Rekening Surat Berharga.

3. Repo Rate

- a. Bank Indonesia mengenakan bunga repo atas transaksi lending facility sebesar BI-Rate ditambah margin tertentu.
- b. Bunga repo dihitung berdasarkan metode bunga dibayar di belakang (simple interest).

4. Pengumuman Lending Facility

- a. Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi lending facility melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya paling lambat sebelum window time.
- b. Pengumuman rencana transaksi lending facility mencakup antara lain:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) window time;
 - 3) jangka waktu;
 - 4) repo rate; dan/atau
 - 5) tanggal dan waktu setelmen.

5. Pengajuan Transaksi

- a. Bank mengajukan transaksi lending facility

kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan.

- b. Pengajuan transaksi lending facility oleh Bank mencakup antara lain nilai nominal, seri dan jenis Surat Berharga yang di-repo-kan.

6. Pengumuman Hasil Transaksi

Setelah window time ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi lending facility dengan cara sebagai berikut:

- a. secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai transaksi yang diterima dan repo rate; dan
- b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal yang diterima dan repo rate.

7. Setelmen Transaksi

a. Setelmen first leg

- 1) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg pada tanggal transaksi (same day settlement) pada awal periode pre cut-off Sistem BI-RTGS.
- 2) Setelmen first leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme Delivery Versus Payment (DVP) secara transaksi per transaksi (gross to gross) sebagai berikut:
 - a) Setelmen Surat Berharga, dengan mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga yang di-repo-kan.
 - b) Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen first leg.
 - c) Perhitungan nilai setelmen first leg adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter.

- 3) Dalam hal Bank tidak memiliki jenis dan seri Surat Berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen first leg maka BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi lending facility.

- 4) Atas batalnya transaksi lending facility sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter.

- 5) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi lending facility dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen first leg dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

b. Setelmen second leg

- 1) Pada tanggal jatuh waktu lending facility (second leg), BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen second leg sejak Sistem BI - RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS.
- 2) Setelmen second leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi (gross to gross) sebagai berikut:
 - a) Setelmen Dana, dengan mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen second leg, yang dihitung sebagai berikut:

Nilai Setelmen Second leg	=	Nilai Setelmen first leg	+	Bunga Repo Lending Facility
---------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------

Keterangan:

Bunga Repo Lending Facilty	=	Nilai Setelmen First Leg	x	Repo Rate	x	Jangka waktu 360
----------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------	---	---------------------

- b) Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga yang di-repo-kan.
- c) Perhitungan nilai setelmen second leg adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai

kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter.

- 3) Dalam hal Bank tidak memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen second leg sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen second leg, BISSSS secara otomatis membatalkan transaksi lending facility jatuh waktu (second leg).
- 4) Dalam hal terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam butir 3), pada saat second leg Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar kewajiban pembayaran bunga repo lending facility.
- 5) Atas batalnya transaksi lending facility jatuh waktu (second leg) sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter.
- 6) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi lending facility dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen second leg dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

8. Kegagalan Setelmen Second leg

Dalam hal Bank gagal melakukan setelmen second leg maka Surat Berharga yang di-repo-kan diperlakukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Surat Berharga berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pelunasan Surat Berharga sebelum jatuh waktu (early redemption) secara otomatis melalui BI-SSSS.
- b. Dalam hal Surat Berharga berupa SBN maka transaksi yang bersangkutan diperlakukan sebagai transaksi penjualan se-

cara outright.

- c. Perhitungan nilai setelmen dan penggunaan harga Surat Berharga untuk transaksi penjualan secara outright adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter.
- d. Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlakukan sebagai transaksi outright:

- 1) Rekening Giro Rupiah akan didebet atau dikredit dengan perhitungan sebagai berikut:

- a) Dalam hal harga pada transaksi outright lebih rendah dari harga pada transaksi first leg setelah dikurangi haircut, maka Rekening Giro Rupiah didebet sebesar selisih dimaksud, setelah dikalikan dengan nilai nominal Surat Berharga yang di-repo-kan;
- b) Dalam hal harga pada transaksi outright lebih tinggi dari harga pada transaksi first leg dikurangi haircut maka Rekening Giro dikredit sebesar selisih dimaksud, setelah dikalikan dengan nilai nominal Surat Berharga yang di-repo-kan dan paling banyak sebesar nilai dari haircut yang ditetapkan pada saat first leg.

- 2) Rekening Giro Rupiah akan dikredit sebesar accrued interest/imbalan dari setelmen first leg sampai dengan setelmen second leg.

- 3) Rekening Giro Rupiah akan didebet sebesar bunga repo.

9. Kupon Surat Berharga

- a. Dalam hal SBN yang di-repo-kan dalam lending facility memiliki kupon/imbalan, maka hak atas penerimaan kupon/imbalan dimaksud merupakan milik Bank.
- b. Perlakuan kupon/imbalan dalam hal terdapat kegagalan setelmen second leg dan Surat Berharga berupa SBN adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal setelah tanggal transaksi outright sebagaimana dimaksud dalam butir 8.b Bank Indonesia menerima

pembayaran kupon/imbalan atas SBN yang di-repo-kan Bank maka kupon/imbalan yang diterima menjadi milik Bank Indonesia.

- 2) Dalam hal pada tanggal transaksi outright Bank menerima pembayaran kupon/imbalan atas SBN yang di-repo-kan, maka Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah yang bersangkutan sebesar kupon/imbalan yang diterima oleh Bank.
- 3) Dalam hal setelah tanggal transaksi outright Bank menerima pembayaran kupon/imbalan atas SBN yang di-repo-kan, maka pada tanggal pembayaran kupon/imbalan Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah yang bersangkutan sebesar kupon/imbalan yang diterima Bank.

IV. DEPOSIT FACILITY

1. Prinsip Transaksi

- a. Transaksi deposit facility dilakukan dengan cara penempatan dana Rupiah oleh Bank secara berjangka di Bank Indonesia.
- b. Transaksi deposit facility dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan Surat Berharga.
- c. Transaksi deposit facility dilakukan dengan mekanisme nonlelang.

2. Tingkat Diskonto

- a. Transaksi deposit facility dilakukan dengan sistem diskonto dengan tingkat diskonto sebesar BI-Rate dikurangi marjin tertentu.
- b. Nilai tunai transaksi deposit facility dihitung berdasarkan diskonto murni (true discount) sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jangka Waktu})}$$

- c. Nilai diskonto transaksi deposit facility dihitung sebagai berikut:

$$\text{Nilai Diskonto} = \text{Nilai Nominal} - \text{Nilai Tunai}$$

3. Pengumuman Deposit Facility

- a. Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi lending facility melalui Sistem BI-

ETP dan/atau sarana lainnya paling lambat sebelum window time.

- b. Bank Indonesia mengumumkan transaksi deposit facility, yang mencakup antara lain:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) window time;
 - 3) jangka waktu;
 - 4) tingkat diskonto; dan/atau
 - 5) waktu setelmen.
4. Pengajuan Transaksi
 - a. Bank mengajukan transaksi deposit facility kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan dengan menyebutkan nilai nominal transaksi.
 - b. Nilai nominal setiap pengajuan transaksi deposit facility paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Pengumuman Hasil Transaksi

Setelah window time ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi deposit facility dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai transaksi yang dimenangkan dan tingkat diskonto; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal yang diterima dan tingkat diskonto.
- ##### 6. Setelmen Transaksi
- a. Setelmen transaksi
 - 1) Bank Indonesia melakukan setelmen deposit facility pada tanggal transaksi (same day settlement) pada awal periode pre cut-off Sistem BI-RTGS;
 - 2) Setelmen deposit facility dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dengan mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar nilai transaksi deposit facility Bank yang bersangkutan.
 - 3) Dalam hal Bank tidak memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen

deposit facility sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi deposit facility.

4) Atas batalnya transaksi deposit facility sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter.

5) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi deposit facility dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen deposit facility dalam 1 (satu) hari, maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

b. Setelmen jatuh waktu deposit facility

Pada tanggal jatuh waktu deposit facility, Bank Indonesia melakukan pelunasan deposit facility sebesar nilai nominal deposit facility dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal Bank tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat dilakukan setelmen sehingga menyebabkan batalnya transaksi sebagaimana dimaksud pada butir III.7.a.3), butir III.7.b.3) dan butir IV.6.a.3), Bank dikenakan sanksi berupa:

a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi Bank yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Dalam hal transaksi memiliki second leg, nilai transaksi yang batal sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b adalah nilai transaksi pada saat first leg.

3. Penyampaian surat teguran tertulis seb-

agaimana dimaksud dalam butir 1.a dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah yang bersangkutan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

5. Atas batalnya transaksi Operasi Moneter, yang meliputi transaksi Operasi Pasar Terbuka dan transaksi Standing Facilities, yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.

6. Sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diberlakukan mulai 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Contoh pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti transaksi moneter sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

Untuk transaksi yang dilakukan setelah berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini yang merupakan bagian dari transaksi yang telah dilakukan sebelum Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku, tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/17/DPM tanggal 6 Juli 2010 perihal Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/31/DPM tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan transaksi yang bersangkutan jatuh waktu.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/17/DPM tanggal 6 Juli 2010 perihal Koridor Suku Bunga (Standing Facilities); dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/31/DPM tanggal 27 Agustus 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/17/DPM tanggal 6 Juli 2010 perihal Koridor Suku Bunga (Standing Facilities), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.

DODDY ZULVERDI
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

(BN)

PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN KERJA MANAJER ENERGI DI INDUSTRI DAN BANGUNAN GEDUNG

(Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I Nomor 41 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kompetensi manajer energi yang berkualitas dan memiliki kemampuan teknis serta keterampilan khusus di industri dan bangunan gedung, perlu memberlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Manajer Energi di Industri dan Bangunan Gedung secara wajib;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Manajer Energi di Industri dan Bangunan Gedung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang